



Implementasi Program Merdeka Belajar (Studi Di SMP Negeri 2 Polinggona)

INFO PENULIS

Yogi Iswahyuni
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Indonesia
iswahyuni283@gmail.com

Arafat Mallapiseng
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Indonesia
afatpascaunm@gmail.com

Ahmad Lamo Said
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Indonesia
AhmadLamoSaid@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 1, April 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Iswahyuni, Y., Mallapiseng, A., & Said, A. L. (2026). Implementasi Program Merdeka Belajar (Studi Di SMP Negeri 2 Polinggona). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 978-985.

Abstrak

Artikel ini merupakan luaran dari penelitian yang membahas tentang implementasi dari program merdeka belajar di SMP Negeri 2 Polinggona. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari program merdeka belajar yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Polinggona. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program merdeka belajar di SMP Negeri 2 Polinggona belum sepenuhnya efektif. Dari aspek komunikasi, komunikasi internal (antar guru dan dari kepala sekolah) sangat kuat. Namun, komunikasi eksternal dari dinas pendidikan dan pusat lemah, dengan bahasa instruksi yang sulit dipahami, sosialisasi lambat, dan pelatihan terbatas. Dari aspek sumber daya, menunjukkan keterbatasan signifikan, termasuk jaringan internet buruk, fasilitas teknologi (WiFi dan laptop) yang kurang, serta kekurangan bahan ajar dan laboratorium akibat alokasi Dana BOS yang terbatas. Dari aspek disposisi secara umum positif: kepala sekolah, guru dan siswa proaktif dan antusias terhadap merdeka belajar. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, hierarki birokrasi (seperti persyaratan laporan administrasi) menciptakan beban kerja tinggi bagi guru, mengurangi waktu untuk inovasi kreatif di kelas. Menunjukkan struktur yang teratur namun kurang efisien, birokrasi yang kaku dapat menghambat fleksibilitas program seperti Merdeka Belajar, yang membutuhkan alokasi waktu untuk eksplorasi siswa.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Program, Merdeka belajar

Abstract

This article is the outcome of a study examining the implementation of the Merdeka Belajar program at SMP Negeri 2 Polinggona. The study aims to investigate the implementation of the Merdeka Belajar program carried out by SMP Negeri 2 Polinggona. This study is classified as descriptive research using a qualitative approach. Data collection techniques included interviews, observations, and document analysis. The results indicate that the Merdeka Belajar program at SMP Negeri 2 Polinggona has not yet been fully effective. In terms of communication, internal communication (among teachers and from the principal) is very strong. However, external communication from the education office and the central government is weak, characterized by difficult-to-understand instructions, slow dissemination, and limited training. In terms of resources, significant limitations are evident, including poor internet connectivity, insufficient technological facilities (such as WiFi and laptops), as well as a shortage of teaching materials and laboratories due to limited allocation of the School Operational Fund (BOS). In terms of general disposition, the outlook is positive: school principals, teachers, and students are proactive and enthusiastic about Merdeka Belajar. Meanwhile, in terms of bureaucratic structure, the bureaucratic hierarchy (such as administrative reporting requirements) creates a heavy workload for teachers, reducing the time available for creative innovation in the classroom. Reflecting a structured yet inefficient system, rigid bureaucracy can hinder the flexibility of programs like Merdeka Belajar, which require time for student exploration.

Keywords: Implementation, Public Policy, Program, Merdeka Belajar

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah proses mengubah seseorang menjadi individu yang mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan. Dimana pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya membuat siswa siap untuk bekerja atau bekerja, tetapi juga membantu mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi setiap hari. Pendidikan seharusnya tidak hanya membantu siswa mengembangkan bakat yang sesuai dengan pengetahuan yang mereka pelajari. Sebaliknya, pendidikan seharusnya bertujuan untuk menghasilkan individu yang seperti: orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab, produktif, dan sehat secara fisik dan mental (Priana et al., 2020).

Keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah satu contoh untuk hal tersebut yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan program Wajib Belajar. Program Wajib Belajar 9 Tahun tercantum dalam peraturan pemerintah No.47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No.20 Tahun 2003. Kemudian sebagai keberlanjutan dari program Wajib Belajar 9 Tahun, pada tahun 2012 Pemerintah Pusat mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang lebih dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU). Adapun payung hukum untuk program PMU ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.80 Tahun 2013. Program ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 (Masyitah et al., 2023).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa Gerakan reformasi di Indonesia secara keseluruhan meminta diterapkannya demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan membawa perubahan signifikan pada isi, proses, dan pengelolaan sistem pendidikan. Di samping itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menimbulkan kebutuhan baru di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pembaruan dalam sistem pendidikan, antara lain pembaruan kurikulum yang mencakup diversifikasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik serta potensi daerah yang bervariasi, pengembangan jenis pendidikan yang dijalankan secara profesional, serta penyusunan standar kompetensi lulusan yang berlaku di tingkat nasional dan lokal sesuai dengan kondisi setempat.

Pembaruan sistem pendidikan juga mencakup penghapusan perbedaan perlakuan antara

pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan yang dikelola oleh masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Perubahan sistem pendidikan nasional dilaksanakan untuk memperbarui tujuan, misi, dan cara pengembangan pendidikan di tanah air. Pendidikan nasional memiliki tujuan untuk menjadikan sistem pendidikan sebagai lembaga sosial yang kuat dan dihormati, yang dapat memberdayakan setiap warga negara Indonesia untuk tumbuh menjadi individu bermutu sehingga mereka mampu dan aktif menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Perubahan kurikulum adalah suatu keharusan yang harus dijalani oleh setiap negara di seluruh dunia, hal ini terjadi karena untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman yang terus berkembang. Agar dapat berjalan dengan efektif, komponen-komponen dalam kurikulum juga perlu berkualitas dan selalu disesuaikan dengan perubahan zaman (Ulinniam et al., 2021).

Berdasarkan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa Peserta Didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

Perubahan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka belajar merupakan perubahan yang paling signifikan di tingkat sekolah dasar dan menengah, sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang tematik dan integratif. Kurikulum ini memiliki konsep yang baik dalam pendidikan karena mendorong siswa untuk melihat, memperhatikan, dan mengamati lingkungan sekitar mereka, bukan hanya fokus pada menghafal (Zubaidah et al., 2023).

Menurut (Sherly et al., 2021), kurikulum merdeka belajar dijadikan sebagai sebuah program yang bertujuan untuk membangun kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi guru dan siswa. Program ini adalah wujud penyesuaian kebijakan dalam mengembalikan inti dari tujuan penilaian yang selama ini diabaikan. Amanat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional adalah untuk memberikan keleluasaan sekolah dalam menerjemahkan kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka.

Kurikulum Merdeka Belajar dipahami sebagai suatu rancangan pembelajaran yang memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dengan nyaman, rileks, menyenangkan, serta tanpa stres dan tekanan, agar mereka dapat mengeluarkan bakat alami mereka. Berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang pernah ada sebelumnya, saat ini diperlukan sebuah paradigma baru dalam pendidikan dengan menerapkan Kurikulum Merdeka yang menggunakan konsep Merdeka Belajar, di mana para guru diharapkan mampu menjalankan proses pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan dan memperhatikan kebutuhan serta potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik (Iqbal et al., 2023). Namun demikian, di lapangan ditemukan sejumlah kendala yang justru membuat pelaksanaan Kurikulum Merdeka tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti dalam pemanfaatan PMM. Guru sebagai pelaksana kebijakan di tingkat sekolah sering kali merasa terbebani dengan berbagai tuntutan administratif dan teknis yang melekat dalam penggunaan platform ini. Banyak guru menyampaikan bahwa PMM terlalu rumit, tidak praktis, dan menambah beban kerja, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika terjadi di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak stabil, ada juga masalah dalam beradaptasi dengan perubahan metode pengajaran. Kurangnya pelatihan dan pendampingan serta dukungan kelembagaan yang masih kurang maksimal bagi para guru dalam menerapkan kurikulum merdeka juga menjadi hambatan. Salah satu contoh nyata yaitu di SMP Negeri 2 Polinggona dalam penerapan program merdeka belajar masih ada kendala.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan bahwa penerapan merdeka belajar baru satu tahun yaitu pada tahun pelajaran 2024/2025 yang hanya diterapkan di kelas VII dengan jumlah siswa 22. Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, para pendidik di sekolah ini mengalami sejumlah tantangan dalam mengakses dan menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Selain kendala teknis, ada juga masalah dalam beradaptasi dengan perubahan metode pengajaran. Kurangnya pelatihan dan pendampingan serta dukungan kelembagaan yang masih kurang maksimal bagi para guru dalam menerapkan kurikulum merdeka juga menjadi hambatan. Ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan di tingkat pusat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, yang menjadi salah satu perhatian utama dalam kajian administrasi publik, terutama dalam analisis implementasi kebijakan.

Implementasi kurikulum merdeka masih belum dapat berjalan secara mulus di daerah-daerah pelosok karena masih kurang akses internet dan tidak selalu adanya sinyal yang stabil, sehingga memerlukan bantuan media pembelajaran berupa internet dan teknologi yang dapat mendukung sarana dalam pembelajaran. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang masih belum merata ini adalah suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di banyak sekolah daerah terpencil, termasuk pedesaan, yang menghadapi kendala dalam akses terhadap perangkat teknologi yang kurang memadai.

Sehingga agar pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini dapat berjalan merata di sekolah dasar dan menengah, maka diperlukan kerja sama antara pemerintah, sekolah, guru dan masyarakat untuk mengatasi kendala yang ada, dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan para guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka secara efektif, dan melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga dengan adanya kerja sama yang baik, maka diharapkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat menjadi lebih merata dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.

Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh banyak hal, seperti cara komunikasi kebijakan, sumber daya yang ada, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Jika salah satu elemen ini tidak berfungsi dengan baik, maka kemungkinan besar kebijakan yang seharusnya bagus akan sulit untuk dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai proses penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa perlu melakukan kajian mendalam terkait Implementasi program merdeka belajar di SMP Negeri 2 Polinggona. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian program merdeka belajar. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan dari Kurikulum Merdeka.

B. Metodologi

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif. Menurut (Harahap et al., 2024) Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena atau konteks tertentu melalui pengumpulan data berupa teks, gambar, suara, atau observasi yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan dengan menggunakan tehnik Purposive Sampling. Adapun informan dalam penelitian ini adalah : Kepala sekolah, Para dewan guru dan peserta didik yang memiliki pengetahuan tentang kurikulum merdeka yang mereka rasakan. Untuk mendukung hasil yang dicapai dalam penelitian ini, Sumber Data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) melalui kuesioner, kelompok fokus, panel, dan data dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh peneliti dari data yang sudah ada melalui catatan atau dokumentasi dan data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan analisis dokumen. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara koding, Triangulasi dan analisis matriks (Harahap et al., 2024). Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Polinggona yang berlokasi di Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka. Fokus penelitian ini menggunakan teori menurut George C. Edward III (Ashari et al., 2024) dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut (Arafat, 2023) implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam siklus kebijakan dimana keputusan kebijakan yang telah diambil diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan Teori Edward III yang menyebutkan bahwa model ini dengan *direct and indirect impact on implementation* (Ashari et al., 2024). Pada model ini dikatakan bahwa ada empat variabel yang hadir sebagai elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yang keempatnya elemen ini saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Keempat variabel tersebut adalah variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel disposisi, dan variabel struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan terletak pada pengetahuan akan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu sangat penting komunikasi dilakukan baik antara pembuat kebijakan dengan Implementor kebijakan, pembuat kebijakan dengan target/sasaran pelaksanaan kebijakan, antara sesama implementor kebijakan untuk menghindari ambiguitas pemahaman tentang kebijakan yang ingin diimplementasikan, maupun antara implementor kebijakan dengan target/sasaran pelaksanaan kebijakan (Ashari et al., 2024).

Komunikasi memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi kurikulum ini. Dari sisi sekolah, komunikasi yang jelas dari dinas pendidikan dan kepala sekolah dapat memberikan arahan yang tepat, pelatihan yang memadai, dan dukungan logistik. Sementara itu, komunikasi antar guru memfasilitasi pertukaran pengetahuan, praktik terbaik, dan kolaborasi dalam menyusun perangkat ajar. Tanpa komunikasi yang efektif, guru mungkin merasa bingung atau kurang siap, yang dapat menghambat inovasi pembelajaran.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan terletak pada mekanisme internal sekolah, seperti rapat, pendampingan rutin, komunitas belajar, dan grup WhatsApp, yang memungkinkan koordinasi efektif antarguru. Hal ini tercermin dari hasil penelitian kepala sekolah dan guru yang menekankan kejelasan instruksi dan efektivitas komunikasi. Pernyataan yang diungkapkan juga oleh siswa, menunjukkan bahwa guru telah berhasil menerapkan Kurikulum Merdeka dengan baik, di mana komunikasi tidak hanya satu arah, tetapi interaktif. Guru secara rutin menjelaskan capaian pembelajaran dan pembaruan kurikulum di awal semester. Ini menunjukkan bahwa siswa menerima informasi langsung tentang Kurikulum Merdeka, meskipun mungkin tidak mendalam, tetapi cukup untuk memberikan pemahaman dasar. Secara keseluruhan, pandangan mereka positif, menunjukkan bahwa komunikasi guru efektif dalam membuat siswa memahami dan terlibat dengan kurikulum. Namun, kelemahan muncul dari sisi eksternal, yaitu instruksi dari pusat yang bahasanya sulit dipahami dan sosialisasi dari dinas pendidikan yang lambat, serta keterbatasan pelatihan bagi kepala sekolah dan guru, seperti yang disampaikan oleh guru lain. Kurikulum Merdeka diperkenalkan pada tahun 2020, dan implementasinya secara bertahap, tetapi hingga 2025, masih ada laporan tentang ketidakmerataan pelatihan. Namun dinas pendidikan hanya memberikan arahan umum melalui surat edaran atau rapat daring, tanpa sesi praktis yang mendalam. Ini bisa membuat kepala sekolah kesulitan dalam menerjemahkan instruksi ke tingkat sekolah, dan guru merasa tidak siap. Dalam konteks ini, komunikasi yang buruk dari dinas dapat menciptakan kesenjangan pengetahuan, di mana beberapa guru maju sendiri, sementara yang lain tertinggal.

Hasil temuan yang dijelaskan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Setiarani et al., 2025) yang menyatakan bahwa Penerapan Kurikulum Merdeka masih menghadapi kendala berupa kurangnya kejelasan dalam panduan operasional. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam menentukan metode pembelajaran, tanpa arahan yang konkret, guru merasa kesulitan dalam menyesuaikan materi ajar dengan prinsip yang diharapkan dalam kurikulum ini.

2. Sumber Daya

Sama dengan model pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn, bahwa hal terpenting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah ketersediaan resource (sumber daya). Sebagus apapun suatu kebijakan yang telah diputuskan serta sebaik apapun komunikasi dilakukan, jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai maka akan mengalami hambatan yang pada akhirnya bisa jadi kebijakan yang ada hanya sebatas dokumen tanpa aksi (Tri et al., 2024).

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian SMPN 2 Polinggona menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, terutama dalam sarana prasarana, teknologi, dan bahan ajar, yang berdampak pada efektivitas pembelajaran. Secara spesifik, keterbatasan jaringan internet dan fasilitas teknologi (seperti WiFi yang buruk dan laptop yang kurang) menghambat akses ke PMM dan

pembelajaran digital, yang merupakan komponen kunci Program Merdeka Belajar. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terbatasnya Dana Boss, keterbatasan sumber daya, terutama dalam sarana prasarana, teknologi, dan bahan ajar, yang berdampak pada efektivitas pembelajaran. Meskipun begitu kepala sekolah dan guru menunjukkan inisiatif kreatif, seperti penggunaan bahan bekas dan kerja sama dengan masyarakat, yang mencerminkan prinsip adaptasi lokal dalam Program Merdeka Belajar. Namun, solusi ini tidak sepenuhnya mengatasi kekurangan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran. Kekurangan bahan ajar dan fasilitas laboratorium, seperti yang disebutkan oleh guru, menunjukkan bahwa Program Merdeka Belajar belum sepenuhnya didukung oleh alokasi anggaran yang memadai.

Keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun non-finansial, sering menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga kerja terlatih, infrastruktur yang tidak memadai, atau akses terbatas terhadap teknologi dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Hasil temuan yang telah dijelaskan di atas sejalan dengan penelitian (Priyadi et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa Kelengkapan infrastruktur (sarana dan prasarana) dan fasilitas menjadi tantangan lain dalam penerapan kurikulum otonom di sekolah dasar. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi "revolusi industri 5.0" yang berfokus pada teknologi dan manusia, perlu dilakukan pengelolaan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang relevan. Dengan demikian, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai dapat mengakibatkan hasil pembelajaran yang kurang ideal.

3. Disposisi

Menurut (Igirisa, 2022) disposisi diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh aparat pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi atau sikap yang baik dalam menjalankan tugas, maka implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika aparat pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak akan berjalan dengan baik. Disposisi bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang kreativitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan realitas lapangan.

Disposisi dalam Program Merdeka Belajar menekankan bahwa keberhasilan program bergantung pada komitmen manusia. Tanpa disposisi yang kuat, bahkan kebijakan yang dirancang dengan baik oleh Kemendikbudristek bisa gagal di lapangan. Disposisi menentukan bagaimana program ini "dihidupkan" melalui tindakan sehari-hari, seperti pengembangan materi ajar yang fleksibel.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa disposisi (sikap atau kecenderungan) terhadap Program Merdeka Belajar di sekolah ini secara umum positif dan mendukung inovasi pendidikan. Kepala sekolah menunjukkan disposisi kepemimpinan yang proaktif dan inklusif, dengan fokus pada motivasi dan pendampingan, yang mencerminkan komitmen untuk kemajuan sekolah. Guru-guru menampilkan disposisi terbuka dan adaptif, dengan variasi berdasarkan usia: guru muda lebih semangat terhadap teknologi, sementara guru senior lebih berhati-hati namun tetap termotivasi setelah pendampingan. Kedua siswa memiliki sikap optimis dan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka karena kurikulum ini dianggap mampu mengubah stigma belajar yang membosankan menjadi kegiatan yang kolaboratif dan menyenangkan melalui proyek nyata. Mereka kompak untuk memberikan jawaban bahwa mereka merasa senang atas adanya perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum merdeka. Meskipun pada awalnya muncul tantangan berupa beban tugas yang terasa lebih banyak dan rasa bingung terhadap alur baru, siswa menunjukkan sikap adaptif dan terbuka. Rasa bingung tersebut terbayar dengan manfaat nyata yang mereka rasakan setelah menjalani prosesnya. Siswa menunjukkan disposisi antusias dan reflektif, di mana tantangan awal berubah menjadi pengakuan manfaat melalui pengalaman langsung. Secara keseluruhan, disposisi ini menciptakan ekosistem yang kondusif untuk implementasi kurikulum, dengan potensi untuk penguatan lebih lanjut melalui kolaborasi dan dukungan berkelanjutan.

4. Struktur Birokrasi

Organisasi yang mengemban tugas mengimplementasi kebijakan memiliki struktur birokrasi. Semakin panjang struktur suatu organisasi maka akan panjang proses yang akan dilalui dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan adanya prosedur operasional

standar yang menjadi acuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Struktur birokrasi harus kondusif agar implementasi kebijakan bisa terlaksana dengan baik, Yang menjadi kelemahan dalam struktur birokrasi adalah prosedur yang harus dilalui cenderung panjang dan berbelit-belit sehingga terkadang melemahkan fungsi pengawasan rawan terjadinya red. Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi (Ashari et al., 2024).

Struktur birokrasi harus kondusif agar implementasi kebijakan bisa terlaksana dengan baik, Yang menjadi kelemahan dalam struktur birokrasi adalah prosedur yang harus dilalui cenderung panjang dan berbelit-belit sehingga terkadang melemahkan fungsi pengawasan rawan terjadinya red tape.

Berdasarkan Hasil penelitian struktur birokrasi yang ada di SMPN 2 Polinggona memiliki aturan dan prosedur yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, seperti panduan formal untuk pembelajaran. Namun, hierarki birokrasi (misalnya, persyaratan laporan administrasi) menciptakan beban kerja yang tinggi, sehingga mengurangi waktu guru untuk inovasi kreatif di kelas. Ini menunjukkan struktur yang teratur tapi kurang efisien dalam mengalokasikan waktu. Struktur birokrasi di SMPN 2 Polinggona dapat digambarkan sebagai sistem yang seimbang antara keteraturan formal dan fleksibilitas operasional. Sekolah ini menerapkan aturan dan prosedur yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka, namun ada elemen yang membatasi inovasi guru, terutama terkait beban administrasi. Hierarki tidak kaku, dengan kepala sekolah yang memberikan kepercayaan dan dukungan, serta kerja sama antar guru yang memfasilitasi kreativitas.

Hasil temuan yang telah dijelaskan diatas sejalan dengan penelitian (Redana & Suprpta, 2023) bahwa untuk mempermudah proses pelaksanaan proyek-proyek pembelajaran dengan tidak menerapkan prosedur dan struktur birokrasi yang panjang dan rumit, karena semua itu akan mempersulit guru dan peserta didik. Meskipun memang yang namanya struktur birokrasi dengan SOP tersebut memang harus dijalankan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III yang mengatakan bahwa struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang panjang dengan SOP yang rumit dan terkesan kaku justru akan melemahkan proses pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

D. Kesimpulan

Implementasi Program Merdeka Belajar di SMPN 2 Polinggona memiliki pondasi kuat dari disposisi positif dan komunikasi internal, yang mendorong inovasi dan koordinasi efektif. Namun, kelemahan dalam sumber daya terbatas, komunikasi eksternal yang buruk, dan struktur birokrasi yang tidak efisien menghambat potensi penuh program, sehingga implementasi belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuan kemerdekaan belajar. Dengan demikian, Implementasi Program Merdeka Belajar di SMPN 2 Polinggona belum sepenuhnya berhasil mewujudkan tujuan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024, meskipun memiliki pondasi kuat dari disposisi positif dan komunikasi internal. Untuk optimalisasi, diperlukan perbaikan pada sumber daya, komunikasi eksternal, dan efisiensi birokrasi, Hal ini mengakibatkan pembelajaran belum optimal dalam membentuk peserta didik yang mandiri, berakhlak mulia, dan siap sepanjang hayat.

E. Referensi

- Arafat. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK Teori dan Praktek*.
- Ashari, S., Arafat, S. P. I., & Risman Togala, M. S. (2024). *Kebijakan publik: buku ajar*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Harahap, K., Nurhayati, Arafat, & Hatci Itgo. (2024). *Metode penelitian*.
- Igirisa, D. I. (2022). Kebijakan Publik. Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.0>

- 6.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Iqbal, M., Basri, S., & Irmawati. (2023). Implementasi Program Merdeka Belajar di SMA Negeri 9 Makassar. *Jambura Journal of Educational Management*, 4(1), 1–13. <https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjem/index>
- Masyitah, W., Aulia, T., & Yolanda, M. (2023). Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Riau (Studi Kabupaten Kepulauan Meranti). *Prosiding Seminar Nasional ...*, 453–458.
- Priana, W., Pudjo, H., Sishadiyati, & Ika K W, N. (2020). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(4), 59–66.
- Priyadi, M. S., Rachmatia, M., Al Hadi, I. A., & Suhariyanti, M. (2024). Kendala implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. *Griya Cendikia*, 9(1), 114–121.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Redana, D. N., & Suprpta, I. N. (2023). Implementasi kurikulum merdeka di sma negeri 4 singlaraja. *Locus*, 15(1), 77–87.
- Setiarani, R. A. B., Nawawi, A., Sobari, A., Ruchendi, H., & Nuraida, N. (2025). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Sherly, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2021). Merdeka belajar: kajian literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 183–190.
- Tri, J., Mohammad, N., Intan, W., Arafat, R., & Mulyani, S. (2024). *Kebijakan Kebijakan Publik Publik*.
- Ulinniam, Hidayat, Barlian, U. C., & Iriantara, Y. (2021). Penerapan Kurikulum Revisi 2013 Di Masa Pandem Pada SMK IBS Tathmainul Qullub Indramayu. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1), 118–126.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Zubaidah, R. A., Susanto, Y., Manajemen, M., Tinggi, S., Ekonomi, I., Negara, T., Magister,), Bina, U., & Lubuklinggau, I. (2023). *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR BAGI KEPALA SEKOLAH SD SMP DAN PENGAWAS IMPLEMENTATION OF THE INDEPENDENCE OF LEARNING PROGRAM FOR ELEMENTARY, JUNIOR HIGH SCHOOL PRINCIPLES AND SUPERVISORS*. 2(4), 189–193.